

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Muhammad Asrun. et al. 2000. *Analisa Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*, Jakarta; CINLES, Centre for Information & Law, Economic Studies.
- Bruggink. 1996, *Rechtsreflecties*. (terjemahan Arief Sidharta). Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Elyta Ras Ginting. 2019. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit*. Jakarta; Sinar Grafika,
- Emmy Yussarie. 2005. *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta; Pusat Pengkajian Hukum.
- Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law dictionary*. St. Paul Meinnesa; West Publishing Co.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jerry Hoff.1999. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta; Tatanusa.
- J.B Huizunk. 2004. *Insolventie*. (terjemahan Linus Doludjawa). Jakarta; Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartono. 1982. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung; Alumni.
- Milman, David dan Christopher Durrant. 1987. *Corporate Insolvency: Law and Practice*. London; Sweet & Maxwell.

- Muhammad Sarif Nur. 2015. *Hukum Sebagai Persepsi*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institute.
- Ned Waxman. 1992. *Bankruptcy. Gilbert Law Summaries*, Chicago; Hasrcourt Brace Legal and Proesional Publication Inc.
- Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana.
- Rahayu Hartini. 2004. *Hukum Kepailitan*, UMM Press Edisi Revisi Cetakan II, Jakarta; 2004.
- Rudhy Lontoh. Denny Kalimang. Benny Ponto, 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung; Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 1969. *Ilmu hukum*. Bandung; Alumni.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta; Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta; Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah. Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta; Prenada media Group.
- Tami Rusli. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung; UBL Press.
- Ulang Mangung Sosiawan, Syprianus Ariesteus dan Nevey Varida Ariani *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2017. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia,
- Vollmar, 1948, *De Faillesmentwet*, Haarlem; Tjeenk Willink & Zoon N.V.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing,

2. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Irfan Eka Saputra. 2017. *Perspektif Hak Imunitas Kurator saat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Junita Sari Ujung. 2008. *Independensi Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rouf Fajrin Widianoro. 2021. *Kepastian Hukum Pemberesan Harta debitor pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang*. Tesis. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Ratibulava. 2022. *Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit yang merugikan Debitor Pailit Akibat Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang berlarut-larut*. Tesis. Fakultas Hukum Airlangga.

3. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1).

Effendy, M. Y., & Huda, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Honorarium Kurator Dalam Proses Kepailitan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(3).

Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., dan Harianto, D. 2023, *Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari passu prorata parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Nomor 8.

- Luthvi Febryka Nola. 2018. *Mafia Kepailitan Dalam Penjualan Harta Pailit*. Jurnal Kajian Volumen 23 Nomor 3. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Prawira, M. S. N. (2021). Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Dinamika*, 27(5).
- Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. 1997. *Sengketa dan Penyelesaiannya*. Buletin Musyawarah Volume 1 Nomor 1 Indonesian Center for Environmental Law.
- Suyud Margono. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Kurator Terhadap Pelanggaran Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jurnal Yure Humano Volume 5 Nomor 1. Law Faculty of MPU Tantular University.

4. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Buku II.
- Mahkamah Agung RI, Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia, Buku Pendamping.
- Mahkamah Agung, Seri Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia, Buku Pendamping, 2005.

Mahkamah Agung, Seri Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia, Buku Pendamping, 2005

Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan pengurus, KepMen. Kehakiman No M.09. ht. 0510/ 1998

Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator, KepMen. Kehakiman No. M. 02-UM / 1993.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Renvoi.Prosedur/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Juncto. Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 8 Oktober 1999

Putusan Mahkamah Agung No.03/K/N/1998, tanggal 2 Desember 1998

Putusan Mahkamah Agung No.06.PK/N/1999, tanggal 14 Mei 1999

Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn, tanggal 30 September 2019